

**BENTURAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN AFILIASI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG: STUDI KASUS
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.**

TESIS

Oleh:

**Martin Hartanto W
NIM : 2102190044**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**BENTURAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN AFILIASI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG: STUDI KASUS
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Martin Hartanto W
NIM : 2102190044**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

dengan; Nama : Martin Hartanto W.

NIM : 2102190044

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Benturan Kepentingan Perusahaan Afiliasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugasakhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 November 2023



Martin Hartanto W.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

BENTURAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN AFILIASI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG: STUDI KASUS
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.

Oleh :

Nama : Martin Hartanto W.
NIM : 2102190044
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 30 November 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
NIDN. 0330106505

Pembimbing II

Dr. Andrew Bellehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M.
NIDN. 0331038704

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.
NIDN. 0327096504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 13 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Martin Hartanto W.
NIM : 2102190044
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul " Benturan Kepentingan Perusahaan Afiliasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst." oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H.M.M.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Hartanto W.
NIM : 2102190044
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Benturan Kepentingan Perusahaan Afiliasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbingan dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 30 November 2022


1000
METERAI TEMPEL
2260BAKX782092076
Martin Hartanto W.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul “Benturan Kepentingan Perusahaan Afiliasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Jurusan Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, ayah penulis H. William dan ibu penulis Yenny Derti yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran, dan juga istri penulis Sofia Merdyanti yang terus mendoakan dan memberi motivasi bagi penulis, memberikan dukungan materi dan moril yang tak terhingga dan tak terbalaskan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia/
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing dan mendukung penulis dengan kesabaran dalam masa penulisan sampai selesainya tesis ini.
5. Bapak Dr. Andrew Betlehn, S.H.,S.Kom.,M.H.M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu membimbing dan mendukung penulis dengan kesabaran dalam

masa penulisan sampai selesainya tesis ini.

6. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini.

Berkat bimbingan dan arahan serta petunjuk dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran-saran dan arahan dari pembaca yang bersifat membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi kita semua, sekian dan terimakasih.

Jakarta, 30 November 2023

Penulis


Martin Hartanto W.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kerangka Teori Dan Konsep	5
1.5. Metode Penelitian	17
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengaturan dan Pengertian PKPU	22
2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan dan PKPU	27
2.3 Proses Permohonan PKPU	37
2.4 Akibat Hukum Putusan PKPU	39
2.5 Tahapan Masa PKPU	42
2.6 Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi)	47
2.7 Karakteristik Badan Usaha Perseroan Terbatas	48
2.8 Prinsip – Prinsip Perseroan Terbatas Indonesia	49
2.9 Afiliasi Dalam Perseroan Terbatas	55

BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA KREDITOR DALAM PROSES PKPU
DALAM HAL ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEBITOR DENGAN
KREDITOR BERPEDOMAN PADA PERKARA PKPU NO. 164/PDT.SUS-
PKPU/2018/PN NIAGA JKT.PST

3.1	Permohonan PKPU.....	58
3.2	Akibat Hukum Putusan PKPU	63
3.3	Proses Pendaftaran Tagihan	72
3.4	Proses Pencocokan Piutang	76
3.5	Hubungan Afiliasi Antara PT. Herculon Carpet dengan PT. Lavidia Herculon	77
3.6	Benturan Kepentingan yang Terjadi Oleh Karena Adanya Hubungan Afiliasi	81
3.7	Proses Pemungutan Suara	83

BAB IV PENERAPAN ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PKPU TERHADAP HUBUNGAN AFILIASI ANTAR PERUSAHAAN DALAM
PROSES PKPU

4.1	Penerapan Asas Keseimbangan Atas Hubungan Afiliasi Antar Perusahaan Dalam Proses PKPU.....	91
4.2	Penerapan Asas Integrasi Atas Hubungan Afiliasi Antar Perusahaan Dalam PKPU	94
4.3	Penerapan Asas Keadilan Atas Hubungan Afiliasi Antar Perusahaan Dalam PKPU.....	96
4.4	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Hubungan Afiliasi Antar Perusahaan Dalam PKPU.....	97
4.5	Proses Pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	99

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2018.....	107
Lampiran 2.	Pengumuman Surat Kabar Proses PKPU PT. Lavidia Herculon.....	206
Lampiran 3.	Penetapan Hakim Pengawas No. 01/HP/XII/2018-164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST.....	207
Lampiran 4.	Formulir Pengajuan Tagihan.....	211
Lampiran 5.	Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Lavidia Herculon	212
Lampiran 6.	Profil Perusahaan Ditjen AHU dari PT. Lavidia Herculon.....	215
Lampiran 7.	Profil Perusahaan Ditjen AHU dari PT. Herculon Carpet.....	218
Lampiran 8.	Surat Penolakan dari Para Kreditor.....	221
Lampiran 9.	Berita Acara Pemberian Persetujuan Atas Masa Perpanjangan PKPU.....	225
Lampiran 10.	Berita Acara Pemberian Persetujuan Terhadap Rencana Perdamaian.....	233
Lampiran 11.	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Pengesahan Perdamaian No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 26 Juni 2019.....	237

ABSTRAK

BENTURAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN AFILIASI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG : STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.

**Oleh :
Martin Hartanto W.
2102190044**

Pranata Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa utang piutang sebagai upaya yang mengedepankan perdamaian dengan semangat permusyawaratan mencari keadilan bagi para pihak. Namun nilai keadilan itu tidak terwujud ketika beberapa Kreditor yang menentukan nasib dari Debitornya berafiliasi dengan Debitor. Bagaimanakah perlakuan terhadap Kreditor Afiliasi ini, apakah Kreditor ini tetap memiliki hak untuk memberikan suara terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Induk/Anak Perusahaannya sendiri menjadi titik kunci dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis. Pengumpulan data dilakukan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) berupa buku-buku, artikel, majalah dan internet yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan penulisan tesis ini. Adapun data yg digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini kreditor yang memiliki benturan kepentingan dengan debitor tidak dapat memberikan suara atas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dengan pertimbangan asas-asas dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna terutama hukum yang mengatur pranata kepailitan. UUK-PKPU tidak menjabarkan secara detail mengenai pengaturan terhadap hubungan afiliasi antara Debitor dengan Kreditor dimana hubungan afiliasi tersebut jelas telah menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemungutan suara atas proposal perdamaian dalam PKPU. Pengurus PKPU tidak memiliki kewenangan kuat untuk bersikap terhadap ketidakadilan yang terjadi oleh karena itu Pengurus PKPU harus dapat beradaptasi nilai-nilai budaya yang terkandung di masyarakat dan mengedepankan keprofesionalitasan dalam menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada etika dan moral.

Kata Kunci : PKPU, Hubungan Afiliasi, Keadilan

ABSTRACT

CONFLICTS OF INTEREST INVOLVING AFFILIATED BUSINESSES THROUGHOUT THE PAYMENT SUSPENSION PROCESS: A CASE STUDY BASED ON THE RULING OF THE COMMERCIAL COURT AT THE CENTRAL JAKARTA STATE COURT NUMBER 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.

**By :
Martin Hartanto W.
2102190044**

The Suspension of Payment institution in bankruptcy law is a solution in resolving debt and receivable disputes as an effort that prioritizes peace with a spirit of deliberation seeking justice for the parties. However, the value of justice is not realized when several creditors who determine the fate of their debtors are affiliated with the debtor. How these Affiliate Creditors are treated, whether these Creditors still have the right to vote on the Peace Proposal submitted by the Parent/Subsidiary Company itself is a key point in this research.

The research method used is a normative legal research method with a descriptive research nature and uses a juridical legal approach. Data collection was carried out using data collection tools in the form of library research in the form of books, articles, magazines and the internet which are closely related to the aims and objectives of writing this thesis. The data used is secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used to analyze data is qualitative analysis.

Based on this research, creditors who have a conflict of interest with debtors cannot vote on the peace proposal submitted by the debtor with consideration of the principles in the Bankruptcy Law and PKPU. The conclusion of this research is that law in Indonesia is still far from perfect, especially the law governing bankruptcy institutions. The bankruptcy law does not explain in detail the regulations regarding the affiliation relationship between Debtors and Creditors, where this affiliation relationship has clearly created injustice in the voting process on peace proposals in the suspension of payment. Suspension of payment management does not have strong authority to respond to injustices that occur, therefore suspension of payment management must be able to adapt to the cultural values contained in society and prioritize professionalism in carrying out their duties guided by ethics and morals.

Key Word : The Suspension of Payment, Affiliate Relationship, Justice